

FESTIVAL KEBUDAYAAN CANBERRA SEBAGAI ALAT DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DI AUSTRALIA (2014-2015)

Oleh

Setyasih Harini dan Halifa Haqqi
Staf Pengajar Fisip Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Abstract

Culture is regarded as forming international bridges and interactions. With culture, state can reach influential members of foreign societies who cannot be reached through traditional embassy function. Bilateral cooperation between Indonesia and Australia is like a roller coaster or love-hate relationship. This study purpose to explain Canberra Festival as tool of cultural diplomacy of Indonesia in Australia. It is qualitative research with literature as source of data. The object is art performance of Indonesia dancer through Canberra Festival in Australia. Indonesia has more opportunities make cultura performance through Canberra Festival after hacking incident. Result of the research show culture diplomacy through Canberra Festival can improve relationship between Indonesia-Australia after hacking accident. The conclusion is Canberra Festival can increase tourist from Australia.

Key words: *foreign relationship, national interest, cultural diplomacy*

Pendahuluan

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh dua negara yang saling berdekatan tidak melulu dapat berjalan dengan mulus. Perbedaan pandangan atau persepsi yang mewarnai atau bahkan menjadi fokus utama dalam hubungan tersebut adalah kepentingan nasional. Pencapaian kepentingan nasional tersebut akan dilakukan oleh tiap-tiap negara kapan pun dan terhadap siapa pun. Upaya untuk mencapai kepentingan nasional tersebut dilakukan dengan berbagai bidang kegiatan dalam hubungan luar negeri seperti politik, ekonomi dan kebudayaan.

Indonesia dan Australia sebagai dua negara yang letak geografisnya cukup berdekatan memiliki hubungan luar negeri yang dinamis. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa demi mencapai kepentingan nasional maka hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Australia tidak selalu berjalan harmonis. Selain karena kepentingan nasional, faktor yang memengaruhi hubungan luar negeri antarnegara bertetangga adalah perbedaan latar belakang baik geografi, sejarah, sistem kependudukan dan politik. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan pemerintah perlu menyusun kebijakan dan langkah yang dapat diterima oleh negara yang akan menjadi partner dalam hubungan luar negerinya.

Dalam kondisi demikian maka budaya memiliki peran menjadi sarana untuk menarik kembali jalinan hubungan luar negeri yang belum dapat berjalan dengan baik. Melalui kebudayaan dalam bentuknya yang *soft* diyakini sebagai medium untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kepentingan. Di sinilah arti pentingnya kebudayaan. Dalam hubungan luar negeri, Indonesia menjadikan budaya sebagai alat atau media untuk melakukan diplomasi. Pemanfaatan budaya tersebut tidak terlepas dari potensi yang dimiliki Indonesia yang belum banyak diketahui oleh masyarakat dari negara lain. Budaya sebagai identitas nasional oleh pemerintah agar bisa lestari diperlukan upaya pengenalan kepada masyarakat dari negara lain.

Melalui diplomasi damai yang dikemas dengan pertunjukan seni diharapkan dapat menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan nasional khususnya kepariwisataan serta kondusifnya hubungan luar negeri. Melalui kebudayaan pulalah ketegangan hubungan luar negeri bisa diredam agar tidak mengarah pada keretakan atau bahkan konflik. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat kebudayaan itu bersifat netral dan universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat manapun dan dari latar belakang apapun. Diplomasi itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai suatu seni untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya dalam menjalin hubungan dengan negara-

negara lain. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa diplomasi yang menggunakan kebudayaan dapat menjadi alat untuk mempererat hubungan luar negeri diantara dua negara. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan kembali festival budaya di Canberra. Melalui penyelenggaraan festival ini diharapkan bisa membangun hubungan luar negeri Indonesia-Australia yang lebih kondusif.

Penelitian ini pada dasarnya menjelaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga diperlukan hubungan luar negeri dengan negara-negara tetangganya. Kebijakan yang diambil suatu negara dengan melakukan hubungan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya yang bukan semata-mata pada pencapaian politik dan keamanan (*hard politic*). Pentingnya hubungan luar negeri juga berpengaruh pada bidang lainnya seperti pariwisata (*soft politic*) yang kesemuanya bermuara pada upaya menjaga eksistensi negara. Upaya untuk mencapai kepentingan nasional tersebut tidak terbatas pada bidang politik dan keamanan namun juga kepariwisataan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman latar belakang sangat perlu memperkenalkan budaya sebagai identitas nasional. Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan budaya Indonesia pada masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia maupun masyarakat Australia sendiri. Pagelaran seni yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia tersebut dikemas dalam bentuk Festival Budaya di Kota Canberra.

Kepentingan Nasional Sebagai Landasan Negara Melakukan Hubungan Luar Negeri

Untuk memahami lebih lanjut tentang Festival Budaya Indonesia di Kota Canberra maka pendekatan yang digunakan adalah dengan kepentingan nasional dan diplomasi kebudayaan. Konsep kepentingan nasional pada dasarnya menjelaskan bahwa untuk mencapai kelangsungan hidup suatu negara harus memenuhi kebutuhannya dengan memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka kehidupan negara akan berlangsung lebih stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial,

maupun pertahanan keamanan. Kepentingan nasional (*national interest*) menurut Daniel S. Papp adalah bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power atau kekuasaan. Dalam ranah hubungan internasional *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol satu negara terhadap negara lain baik secara individual maupun kolektif. Perwita (2006: 123) lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui cara halus atau kasar. Antara lain adalah dengan teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*). Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.

Kiyono (2016: 3) berusaha mengupas pemikiran Hans J. Morgenthau mengenai konsep kepentingan nasional dari sisi Realis. Bahwasanya, konsep ini dianggap rasional sehingga membutuhkan suatu keharusan untuk dipenuhi. Faktor ini bisa diamati dari kebutuhan untuk menjaga dan melindungi secara fisik politik, wilayah, dan bahkan identitas nasional terhadap negara lain. Faktor lain dari kepentingan nasional merujuk pada kepentingan yang dapat berubah-ubah tergantung pada situasi. Di sini, yang dimaksud dengan situasi bisa mengacu pada kondisi internal dalam suatu negara maupun lingkungan eksternal baik secara regional maupun internasional. Pemikiran Kiyono yang mengacu pada konsep kepentingan nasional dari Realis terlihat sekali upaya secara fisik berdasarkan pada rasionalisme untuk mempertahankan eksistensi negara sehingga penggunaan power dianggap sebagai hal logis.

Istilah kepentingan nasional merujuk pada suatu konsep yang disampaikan oleh negarawan maupun para cendekiawan dalam pembentukan negara. Dalam kondisi demikian, istilah ini dimaksudkan untuk menggambarkan aspirasi dan tujuan yang hendak dicapai ketika suatu negara melakukan hubungan luar negeri. Dirunut dari akar katanya, konsep “kepentingan” digunakan sebagai

alat dari para diplomat Inggris dan Italia pada abad ke-16 dan ke-17 untuk menjelaskan proses menuju negara modern. Marleku (2013: 416) memaparkan bahwa proses pembuatan negara modern yang pernah disampaikan oleh Nicholo Machiavelli melalui bukunya yang sangat terkenal "The Prince" telah memprediksikan munculnya kepentingan sebagai konsep yang terintegrasi dalam hubungan internasional.

Ada dua hal penting yang ingin disampaikan oleh Machiavelli melalui karyanya yakni; pertama, bagi seorang negarawan sangat penting untuk mengetahui kapan menggunakan kekuatan agar bisa mencapai tujuan secara efektif. Sementara Clausewitz seperti dikutip oleh Marleku menambahkan bahwa semua perilaku negara dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan diri dan meraih kejayaan. Untuk melindungi kepentingannya, suatu negara akan mengambil kebijakan rasional walaupun harus dilalui dengan perang. Penggunaan perang tersebut walaupun terkadang sebagai keputusan bodoh namun penting untuk melindungi kepentingan nasionalnya (2013: 417). Pada dasarnya kepentingan nasional suatu negara memiliki karakteristik yang pada hakikatnya terdiri dari: (1) Kelangsungan hidup bangsa dan negara (*self preservation*), (2) Kemerdekaan dan tidak dijajah oleh negara lain (*independence*), (3) Keamanan militer (*military security*), (4) Keutuhan wilayah (*territorial integrity*) dan (5) Kesejahteraan ekonomi (*economic well being*).

Jean Marc Coicau dan Nicholas J. Wheeler (2008:2) menambahkan bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan diri dari suatu negara yang secara tradisional mengacu pada keamanan sebagai kepentingan inti atau vital (utama). Keamanan memiliki nilai yang tinggi sehingga negara yang bersangkutan akan melakukan apa saja untuk dapat mencapai dan mempertahankannya. Termasuk jika dalam keadaan terpaksa, negara tersebut akan melakukan peperangan dengan negara lain. Seiring perkembangan waktu, kepentingan nasional berkembang bukan hanya pada keamanan negara tapi juga kepentingan nasional yang muncul sebagai konsekuensi dari letak geografi negara seperti ekonomi, energi, militer. Kepen-

tingan sekunder yang muncul belakangan ini termasuk faktor-faktor normatif identifikasi negara. Untuk pencapaian kepentingan ini, negara yang bersangkutan tidak perlu melakukan peperangan dengan negara lain tapi cukup dengan mengedepankan langkah komunikasi melalui perundingan.

Selanjutnya Jean Marc Coicau dan Nicholas J. Wheeler (2008:3-4) masih mengidentifikasi kembali kepentingan nasional negara yang ketiga yakni kepentingan non-vital. Kepentingan ini tidak secara langsung berhubungan dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negerinya. Hal ini dapat terlihat pada program pertukaran budaya, kerjasama internasional/regional/bilateral dalam menanggulangi suatu bencana, penelitian keilmuan, kerjasama pariwisata, olahraga dan sebagainya. Dari sini menunjukkan bahwa pengenalan identitas nasional yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam balutan pengenalan budaya sangat diperlukan sebagai perwujudan upaya untuk mencapai kepentingan non-vital.

Pentingnya Diplomasi Kebudayaan untuk Mewujudkan Kepentingan Non-Vital

Ryniejska dan Kioldanowicz (2013:2) menjelaskan bahwa penggunaan istilah diplomasi kebudayaan yang ingin ditonjolkan oleh negara yang melakukannya adalah unsur kebudayaan. Negara mengakui bahwa potensinya yang luar biasa dalam bidang kebudayaan menjadi sarana untuk menciptakan image positif dan membantu pencapaian tujuan politik. Pentingnya penggunaan budaya tersebut jika dikaitkan dengan keenam aspek yang dimiliki sebagaimana kutipan Ryniejska dan Kioldanowicz terhadap penjelasan yang diberikan oleh A Kroeber dan C. Kluckhohn yakni sejarah, genetik, normatif, psikologis, dan struktural. Dari keenam aspek tersebut, sejarah menjadi unsur utama sebab dari situlah sebagai titik awal pembentukan peradaban manusia. Sementara kutipan dari A. Klosowska yang dipakai oleh Ryniejska dan Kioldanowicz menekankan bahwa budaya sebagai fenomena, obyek dan proses atau tipe perilaku tertentu dari aktivitas manusia.

Ien Ang, Yudhisthir Raj Isar dan Philip Mar (2015: 365) menjelaskan bahwa terminologi diplomasi kebudayaan saat ini semakin banyak dilakukan oleh negara bangsa sebagai sarana untuk mendukung politik luar negeri. Dalam pelaksanaannya, penggagas utama terhadap pelaksanaan diplomasi kebudayaan berasal dari pemerintah sedangkan pelakunya bisa menggandeng aktivis masyarakat (non-state). Diplomasi kebudayaan terlaksana melalui koneksi kebudayaan trans-nasional untuk meraih kepentingan nasional. Gagasan Raymond William seperti yang dikutip dalam jurnal ini menyebutkan bahwa munculnya diplomasi kebudayaan sebagai alat untuk mempromosikan identitas nasional suatu negara bangsa.

Diplomasi kebudayaan sebagai sebuah seni yang mengedepankan kemampuan bernegosiasi secara politis dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan kekuatan dan kewibawaan ekonomi, politik, dan militer (Tulus Warsito, 2007). Ada dua versi yang ingin ditonjolkan oleh Tulus Warsito mengenai diplomasi kebudayaan. Pertama, pada dasarnya diplomasi kebudayaan hanya menyangkut pemanfaatan kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Dalam pemaknaan untuk versi pertama ini, diplomasi kebudayaan hanya dimanfaatkan sebagai pendukung politik luar negeri. Di sini, Tulus Warsito menghendaki agar pelaksanaan diplomasi kebudayaan tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan wisatawan untuk kepentingan pariwisata domestik.

Selanjutnya, masih dalam pemahaman yang sama, Tulus Warsito mengemukakan versi kedua dari diplomasi kebudayaan. Dalam versi kedua, diplomasi kebudayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan kebudayaan baik dalam rangka praktik politik luar negeri maupun untuk kepentingan pariwisata. Dari pemahaman ini, pariwisata merupakan bagian dari diplomasi kebudayaan. Dari kedua versi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan bisa dilaksanakan oleh negara manapun tanpa memandang seberapa besar tingkat kekuatannya dalam pergaulan internasional. Konsep diplomasi kebudayaan menurut versi yang kedua tersebut ingin menunjukkan bahwa pemanfaatannya bisa

sebagai perwujudan identitas nasional melalui kegiatan promosi kebudayaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diplomasi kebudayaan menjadi sebuah kegiatan melalui promosi budaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menggandeng masyarakat yang dilakukan di negara lain.

Kontroversi Prinsip Bertetangga yang Baik

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh dua negara yang saling berdekatan secara geografis tidak selalui diwarnai dengan keharmonisan. Indonesia dengan Australia sebagai dua negara bertetangga selama ini seringkali diwarnai dengan pasang surutnya hubungan luar negeri. Hubungan kedua negara tersebut dapat digambarkan seperti *roller coaster*, sangat dinamis. Latar belakang pasang surutnya hubungan kedua negara tersebut dapat dilihat dari sejarah dan peta kependudukan Australia. Jika dilihat dari dalam mainlandnya sendiri, mayoritas rakyat Australia adalah keturunan orang kulit putih dari Inggris dan negara-negara Eropa, korban Revolusi Industri. Kelompok masyarakat lainnya dalam porsi yang lebih sedikit adalah para pendatang dari berbagai negara yang pernah mengalami ketidaknyamanan dan ketidakamanan di negaranya sendiri. Dengan komposisi penduduk yang tidak seimbang antara keturunan Inggris dengan bangsa lain dan status politiknya sebagai persemakmuran Britania Raya maka sistem politik, ekonomi dan sosialnya mendapat pengaruh yang sangat besar dari negara induknya.

Sementara jika melihat ke luar *mainland*, Australia dikelilingi oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah kulit berwarna, keturunan Asia. Bisa dikatakan bahwa Australia merupakan negara benua yang salah tempat (*misplaced continent*). Dengan melihat kondisi geografis dan sejarah tersebut memengaruhi pada perilaku masyarakat. Hal ini memperlihatkan gambaran sekelompok orang kulit putih di antara orang kulit berwarna. Secara umum orang kulit berwarna memiliki budaya dan cara pandang yang sangat berbeda dengan orang kulit putih. Orang kulit putih yang tinggal di Australia memiliki budaya Barat dengan tradisi Kristen-Judaisme, dan orang Kaukasoid yang rasis.

Kesadaran akan munculnya jati diri dan nasionalisme Australia sebagai negara yang berdaulat baru muncul pada tahun 1940-an. Ketika pecah Perang Pasifik, Inggris tidak lagi memberikan perlindungan bagi Australia hingga Jepang dapat memasuki wilayah Australia dengan bebas. Momentum ini menjadi tonggak sejarah dibukanya hubungan dengan negara-negara sekitar terutama Indonesia. Pada dasarnya, Australia berusaha untuk menerapkan prinsip bertetangga yang baik (*good neighborhood*) hanya saja dalam pelaksanaannya seringkali mengalami pasang surut. Pasang surutnya hubungan bertentangan antara Indonesia-Australia telah dimulai semenjak kemerdekaan Indonesia.

Dalam dua dekade ini terakhir ini hubungan kedua negara masih menunjukkan dinamikanya. Sekilas akan diuraikan naik turunnya hubungan luar negeri Indonesia-Australia sebagai bukti kontroversinya prinsip bertetangga baik. Pertama, aksi peledakan bom yang meledak di depan Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004. Aksi ini mencoreng citra Indonesia di mata internasional sehingga pemerintah Australia mengeluarkan *travel ban* dan *travel advisory* sebagai kebijakan yang melarang warganegaranya untuk pergi Indonesia karena ketidakamanan. Ketegangan hubungan diplomatik yang ditimbulkan dari adanya kasus tersebut merugikan sektor pariwisata Indonesia.

Terpuruknya hubungan luar negeri Indonesia-Australia kembali terjadi ketika Schapelle Corby, seorang warga Australia yang kedapatan membawa ganja seberat 4,2 kg ketika mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar (www.sumsel.tribunnews.com). Terbongkarnya kasus tersebut kembali mencoret hubungan baik kedua negara yang coba dibangun kembali setelah terorisme. Pemberian grasi yang diberikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan menunjukkan lemahnya citra pemerintah dan negara di mata internasional khususnya dalam hubungan kedua negara. Bagi masyarakat, pemberian grasi yang diberikan oleh mantan presiden kepada terpidana kasus narkoba menyiratkan ketidakseimbangan hubungan luar negeri yang terjalin antara Australia dengan Indonesia. Peristiwa tersebut juga mengingatkan kembali pada lepasnya

provinsi Timor Timur (Timtim) ketika masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada waktu itu pun, PM John Howard secara halus memberikan masukan kepada presiden Indonesia untuk memberikan hak kebebasan bagi warga Timtim yang akhirnya berujung pada referendum kemerdekaan propinsi termuda.

Sikap pemerintah Australia yang menunjukkan keinginannya untuk melakukan intervensi terhadap Indonesia kembali terjadi dalam kasus penyadapan. Penyadapan dilakukan oleh badan intelijen Australia terhadap pembicaraan yang dilakukan oleh mantan Presiden SBY dengan ibu negara dan para pejabat tinggi. Operasi spionase tersebut dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan analis Badan Keamanan Nasional AS yang telah membelot. Data yang dibocorkan merupakan hasil penyadapan yang dilakukan selama 15 hari pada bulan Agustus 2009. Seperti yang dilansir oleh Sidney Morning Heral pada tanggal 31 Oktober 2013, Snowden memaparkan bahwa pemerintah Australia di telah memerintahkan badan intelejennya untuk memasang alat penyadap di kantor kedutaan besar Australia di Jakarta.

Dengan adanya kasus penyadapan tersebut akan berdampak lebih sensitif terhadap hubungan luar negeri kedua negara. Pertama, mantan Presiden SBY waktu itu pernah menyampaikan pandangan politik luar negerinya tentang “a thousand friends zero enemy”. Namun dalam pelaksanaannya justru pandangan ini tercoreng oleh tetangga dekatnya sendiri. Kedua, dengan adanya kasus itu, pemerintah Australia memberikan tawaran kepada Indonesia untuk memperluas penggunaan Bahasa Indonesia pada tiga uniiversitas besar yakni Australia National University, Monash University dan Melbourne University. Tawaran lainnya adalah dengan memperbanyak kegiatan kebudayaan sebagai ajang untuk saling mengenal identitas nasional masing-masing negara (Prabaningtyas, 2013: 1-2). Tawaran yang disampaikan oleh pemerintah Australia tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pelaksanaan diplomasi kebudayaan Indonesia melalui Festival Canberra.

Festival Canberra Sebagai Wujud Pelaksanaan Diplomasi Budaya Indonesia di Australia

Raymond William seperti yang dikutip oleh Ien Ang, Yudhisthir Raj Isar dan Philip Mar (2015: 365) dalam tulisannya yang berjudul *Cultural Diplomacy: Beyond The National Interest?* menyebutkan bahwa munculnya diplomasi kebudayaan sebagai alat untuk mempromosikan identitas nasional suatu negara bangsa. Berdasarkan pada gagasan tersebut maka Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi budayanya berusaha untuk melestarikannya dengan memperkenalkannya pada masyarakat negara lain khususnya Australia. Festival Canberra merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh KBRI Indonesia sejak tahun 2008. Tujuan dari Festival Indonesia adalah pertama, untuk memperkenalkan identitas nasional Indonesia dalam bentuk budaya baik tarian dan kuliner kepada masyarakat Canberra. Kedua, festival kebudayaan tersebut menjadi sarana promosi kepariwisataan Indonesia dan penggerak dalam membangun hubungan baik dengan Australia di tingkat akar rumput. Ketiga, kegiatan tahunan ini menjadi ajang untuk memperkuat ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang tinggal di Canberra dan sekitarnya sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap kekayaan budaya Nusantara.

Seperti yang disampaikan oleh Jean Marc Coicau dan Nicholas J. Wheeler (2008:3-4) bahwa kepentingan nasional negara yang ketiga yakni kepentingan non-vital. Kepentingan ini tidak secara langsung berhubungan dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negerinya. Hal ini dapat terlihat pada program pertukaran budaya. Maka festival kebudayaan Canberra tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan non-vital Indonesia khususnya dalam meningkatkan pariwisata Indonesia. Sade Bimantara juru bicara Festival Canberra dalam twitter @INAEmbous dan facebook: Indonesian Embassy Australia, serta dalam Youtube channel:Indonesia Embassy Canberra menyebutkan bahwa Festival Canberra memiliki pengaruh positif terhadap jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia. Hal ini terbukti pada bulan Januari hingga Agustus 2015 sebanyak 740

ribu wisatawan Australia berkunjung ke Indonesia. Angka ini 40ribu lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2014 dan 120ribu lebih banyak dari tahun 2013. Diplomasi budaya yang sangat agresif yang dilakukan oleh KBRI mampu menarik banyak masyarakat Australia untuk mengenal lebih dekat tentang budaya Indonesia.

Penutup

Hubungan luar negeri dari dua negara bertetangga tidak selalu berjalan hamonis. Ada banyak variabel yang memengaruhi naik turunnya hubungan diplomatis tersebut. Seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Australia selama ini. Sebagai dasar dari pasang surutnya hubungan luar negeri antara Indonesia-Australia adalah karena kepentingan nasional yang berbeda. Masing-masing kepentingan nasional terbentuk karena latar belakang sejarah baik latar belakang penduduk, sejarah politik, geografi hingga persepsi politik. Dengan banyaknya perbedaan yang mendasari terbentuknya hubungan kedua negara maka budaya menjadi sarana untuk menjembatani dan mengkonstruksinya dengan lebih halus. Pengenalan budaya yang dikemas dalam bentuk festival budaya yang diselenggarakan di Kota Canberra menjadi ajang pelaksanaan diplomasi untuk meraih kepentingan non-vital yakni peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ang, Ien, et.al, 2015, *Cultural Diplomacy: Beyond The National Interest?*, *International Journal of Cultural Diplomacy*, Vol. 21, No. 4, University of Western Sidney, Australia.
- Coicau, Jean Marc dan Nicholas J. Wheeler, 2008. *National Interest and International Solidarity: Particular and International Ethics in International Life*, United Nations, University Press.
- Kiyono, Ken, 2016. *A Study of The Concept of National Interest of Hans .J. Moregenthau: as The Standart of American Foreign Policy*, Nagasaki University's Academic Output SITE
- Lukpata, Victor I, 2013. *National Interest and National Development in*

- Nigeria*, International Journal of Public Administration and Management Research, Vol. 2 No. 1, Department of History and Diplomatic Studies, Federal University Wukari, Nigeria,.
- Marleku, Alfred, 2013. *National Interest and Foreign Policy*, The Case of Kosovo, Mediteranean Journal of Social Sciences, Vol. 4 No. 3.
- Richi, Jane dan Jane Lewis, 2003. *Qualitative Research Practice, A Guide for Social Science Students and Researchers*, New Delhi: SAGE Publications.
- Papp, Daniel S, 1988. *Contemporary International Relations”: A Framework for Understanding*, Second Editions, New York: MacMillan Publishing Company.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochmamad Yani, 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Prabaningtyas, Rizka, 2013. Indonesia-Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan, Jurnal Commentaries Vol 20, Issue 1 Institute of International Studies, UGM.
- Ryniejska Marta dan Kiendanowicz, 2013. *Cultural Diplomacy as a Form of International Communication*, Finalist Paper for Best New Research on The Cultural Variable in Public Relations Practice, University of Wroclaw, Warsawa, Polandia.
- Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari, 2007. *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.